



Bandung, 30 April 2026

Nomor : 119/BPR-CDR/Perbarindo_EL/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) Bundel

Kepada Yth,

1. DPP Perbarindo / Perbarindo Pusat
2. Pimpinan Redaksi Majalah Media BPR
Komplek Patra II No.46
Jalan Jenderal Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perihal : **Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Citradana Rahayu Tahun 2025**

Menunjuk POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat & Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Berikut kami sampaikan :

1. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025
2. Tanda Terima Bukti Kirim Laporan Melalui Apollo

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR Citradana Rahayu
Direksi,

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CITRADANA RAHAYU

Pipi Sopiawati
Direktur Utama

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR
TAHUN 2025
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
"CITRADANA RAHAYU"
B A N D U N G

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR CITRADANA RAHAYU
PERIODE DESEMBER 2025**

A. Ringkasan hasil Penilaian (self Assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	Jalan Sunda Nomor 2 A Kota Bandung
Nomor Telepon	022 – 7314945
Penjelasan Umum	Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2025
Peringkat Komposit Hasil penilaian Sendiri (self Assessment Tata Kelola)	2 (baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil penilaian sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR sudah melakukan penerapan tata kelola dengan baik, dan akan tetap berkomitmen menjaga penerapan tata kelola secara konsisten.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Pipi Sopiawati
	NIK*) : -
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas dan wewenang dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris. ✓ Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. ✓ Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip GCG. ✓ Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. ✓ Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. ✓ Direksi bertanggungjawab atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan

	<p>berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PE ManRisk termasuk laporan mengenai profil risiko.</p> <p>✓ Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.</p>
2.	<p>Nama : Kamarul Akbar</p> <p>NIK*) :</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap terselenggaranya tugas-tugas pada unit kerja dibawah supervisi Direktur Operasional. 2. Mengambil alih tugas Direktur Utama, apabila yang bersangkutan berhalangan menjalankan tugasnya. 3. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya atau dengan koordinasi Direktur Utama membahas/ menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik yang menyangkut sektornya sendiri ataupun lintas sektoral. 4. Menghadiri dan ikut aktif dalam rapat Direksi. 5. Menandatangani atas nama Direksi, atau harus menggantikan Direktur Utama yang sedang berhalangan, baik secara sendiri atau bersama anggota Direksi lainnya atau bersama anggota Komisaris, mengenai Surat keputusan, laporan, Risalah Rapat, dan surat menyurat lainnya. 6. Melaksanakan tugas-tugas umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No 1/1995 tentang Peseroan Terbatas, Anggaran Dasar perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku. 7. Bersama Direktur Utama melaksanakan pengurusan PT. BPR Citradana Rahayu yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung jawab pelaksanaan dan penata-usahaan operasional Bank b. Mengendalikan keuangan dan asset BPR c. Membina dan mengawasi karyawan serta memelihara hubungan kerja antar karyawan d. Memonitor rutin dan melaporkan kepada Direktur Utama tingkat kesehatan bank e. Bersama dengan Direktur Utama menetapkan arah kebijakan operasional Bank 8. Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sekurang-kurangnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> (1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>)

	<p>apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>(2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang - undangan;</p> <p>(3) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</p> <p>(4) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <p>(5) Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan</p> <p>(6) Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan penurunan NPL dengan cara : Penagihan kredit kolektibilitas, DPK, KL, Diragukan & Macet ✓ Telah dilakukan penghapusan kredit macet tahun 2025 ✓ Persetujuan kenaikan gaji karyawan sesuai UMK ✓ Persetujuan RBB tahun 2026 ✓ Segera lakukan pemenuhan perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Senfry Limanjaya
	NIK*) : -
	Jabatan : Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. ✓ Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. ✓ Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank. ✓ Dewan komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. ✓ Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, dan pengawas otoritas lainnya. ✓ Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 							
2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Alexander Tjandana MK</td> </tr> <tr> <td>NIK*)</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>: Komisaris</td> </tr> </table>	Nama	: Alexander Tjandana MK	NIK*)	: -	Jabatan	: Komisaris	
Nama	: Alexander Tjandana MK							
NIK*)	: -							
Jabatan	: Komisaris							
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank; b. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. c. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis. d. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. e. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. f. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. g. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait h. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. i. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas 							

	<p>manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.</p> <p>j. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta mengikuti perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.</p>
<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan NPL & penghapusan kredit macet tahun 2025. ✓ Kenaikan gaji karyawan sesuai UMK ✓ Persetujuan RBB tahun 2026 ✓ Segera lakukan pemenuhan perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Saat ini belum memiliki komite – komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite :

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :

	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.									
2.									
dst									

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada kelompok Usaha BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nama kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun sebelumnya (%)
1.		Pipi Sopiawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Kamarul Akbar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun sebelumnya (%)
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Alexander Tjandana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham Pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Nama kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Rinny Limanjaya, Lin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.		Anne Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.

1. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Pipi Sopiawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Kamarul Akbar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Senfry Limanjaya	602000	PT BPR Citradana Rahayu	60 %
			Tidak ada	CV IB Mobil	50 %
			Tidak ada	PT Maxima Integrasi Prima	50 %
			Tidak ada	PT Qaca Coffee Indonesia	36 %
			Tidak ada	IBjaya Rajako Indonesia	95 %
2.		Alexander Tjandana	Tidak ada	PT Alam Indah Kurnia Abadi	16,66 %
				PT. Tiara Alam Abadi	5%

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Pipi Sopiawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Kamarul Akbar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Alexander Tjandana MK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Rinny Limanjaya, Lin	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.		Anne Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Pipi Sopiawati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Kamarul Akbar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Adik Kandung dari Rinny Limanjaya Lin dan Anne Limanjaya
2.		Alexander Tjandana MK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pada BPR

No.	NIK*)	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Senfry Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Adik Kandung dari Rinny Limanjaya Lin dan Anne Limanjaya
2.		Rinny Limanjaya, Lin	Tidak ada	Tidak ada	Kakak Kandung dari Senfry Limanjaya dan Anne Limanjaya
3.		Anne Limanjaya	Tidak ada	Tidak ada	Adik Kandung dari Rinny Limanjaya dan Kakak Kandung Dari Senfry Limanjaya

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,00

*) Gaji yang dimaksud adalah mencakup gaji pokok yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

***) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji

Gaji pegawai yang tertinggi = Rp 200.000.000,00, Gaji pegawai yang terendah = Rp 50.000.000,00

Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$\begin{array}{l}
 \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}} : \frac{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}} \\
 = \frac{\text{Rp 200.000.000,00}}{\text{Rp 50.000.000,00}} : \frac{\text{Rp 50.000.000,00}}{\text{Rp 50.000.000,00}} \\
 = 4 : 1
 \end{array}$$

****) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

H. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	08 Januari 2025	3 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan CKPN 2. KLDM/NPL 3. Strategi Pelaksanaan Strategi Bisnis di tahun 2025 4. Penutupan Kantor Kas Lembang 5. Pembukaan Kantor Sentra Keuangan Khusus Majalaya 6. Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Pengurus (Pak Alexander Tjandana M. Koentoro & Ibu Sriningsih Surja)
2.	10 April 2025	4 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPL 2. Pembahasan CKPN 3. Pembahasan Laba/Rugi 4. Pembukaan Cabang Majalaya
3.	08 Juli 2025	4 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPL 2. AYDA (Sukarela / Lelang) 3. Pembahasan CKPN 4. Pembahasan Laba/Rugi 5. Pembukaan Cabang Majalaya & Rencana Penutupan Cabang Sumedang 6. Evaluasi Pencapaian Target 7. Perlindungan Konsumen 8. Literasi & Inklusi Keuangan
4.	09 Oktober 2025	4 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. NPL 2. AYDA (Sukarela / Lelang) 3. Pembahasan CKPN 4. Pembahasan Laba/Rugi 5. Imbalan Kerja 6. Progres Bisnis Cabang Majalaya

I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.		Senfry Limanjaya	4	-	100%
2.		Alexander Tjandana MK	4		100%

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran = $\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$

J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum - nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum - nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian**)								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak ada	Tidak ada
Dalam Proses Penyelesaian	Tidak ada	Tidak ada
Total		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan (**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.		Senfry Limanjaya	Pemegang Saham		Pipi Sopiawati	Direktur Utama	Sewa Gedung Jw : 1 th (2026 - 2027)	60 juta Per tahun	Cabang Bandung
2.		Senfry Limanjaya	Pemegang Saham		Pipi Sopiawati	Direktur Utama	Sewa Gedung Jw : 1 th (2026 - 2027)	42 juta Per tahun	Cabang Garut
3.		Senfry Limanjaya	Pemegang Saham		Pipi Sopiawati	Direktur Utama	Sewa Gedung Jw : 5 th (2025 - 2029)	50 juta Per tahun	Cabang Majalaya

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10-01-2025	Sosial	Sumbangan bantuan kegiatan amal bhakti	Solidaritas aksi bencana alam Sukabumi	Rp. 250.000,-
2.	07-03-2025	Sosial	Sumbangan kegiatan ramadan	Mesjid Nurul Ikhlas RW 01 Burangrang Lengkong Kota Bandung	Rp. 100.000,-
3.	11-03-2025	Sosial	Sumbangan yayasan penderita cacat bhakti guna	Yayasan penderita cacat bhakti guna di Jalan Raya Cibabat Cimahi	Rp. 100.000,-
4.	21-05-2025	Sosial	Sumbangan kegiatan idul adha	RW 17 Desa Bojongsoang Kabupaten Bandung	Rp. 5.000.000,-
5.	04-06-2025	Sosial	Sumbangan kegiatan idul adha	Mesjid Nurul Ikhlas RW 01 Burangrang Lengkong	Rp. 100.000,-

PT BPR Citradana Rahayu

				Kota Bandung	
6.	03-07-2025	Sosial	Santunan anak yatim	Panti Asuhan Assalam Majalaya Kabupaten Bandung	Rp. 29.084.860,-

Demikian laporan ini kami sampaikan, terima kasih

Bandung, 29 April 2026

PT BPR CITRADANA RAHAYU



Pipi Sopiawati
Direktur Utama



Senfry Limanjaya
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Citradana Rahayu

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040225-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-602000-30042026113725

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

weny.hidayani@bprcitradana.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-30 11:37:25



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.